



Pemkot Yogya Usulkan Perombakan Organisasi

YOGYA, TRIBUN - Guna meningkatkan kinerja dan keefektifan lembaga-lembaga yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemkot mengajukan rancangan peraturan daerah (ra-perda) terkait perombakan kelembagaan. Perombakan lembaga di instansi Pemkot Yogya diharapkan bisa terrealisasikan tahun ini. Mengingat sejak 2008 Pemkot Yogyakarta tidak pernah

” Perombakan kelembagaan ini sudah mendesak untuk dilakukan. Apalagi sejak 2008 kami belum pernah melakukan perombakan ”

melakukan perombakan kelembagaan.

Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutedjo mengatakan, ada tiga ra-perda yang diusulkan yaitu

peraturan daerah tentang dinas, peraturan daerah tentang lembaga teknis daerah dan peraturan daerah tentang sekretariat daerah

■ Bersambung ke Hal 14

Pemkot Yogya

Sambungan Hal 13

dan dewan.

“Perombakan kelembagaan ini sudah mendesak untuk dilakukan. Apalagi sejak 2008 kami belum pernah melakukan perombakan di saat daerah lain sudah (melakukan perombakan kelembagaan) beberapa kali. Perombakan ini dilakukan karena kebutuhan pemerintah untuk menangani tugas tambahan dan fungsi baru,” kata Kris, Senin (9/2).

Perombakan itu, lanjut Kris, meliputi pemecahan dinas yang sudah ada dan juga menambah badan dan kantor baru.

Adapun salah satu dinas yang diusulkan perombakan yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta. Rencananya akan dipecah menjadi Dinas Kebudayaan dan Kantor Pariwisata.

“Pariwisata diusulkan menjadi kantor, karena sete-

lah kami telaah selama ini hanya menggunakan hasil kebudayaan. Artinya apa yang dijual pariwisata adalah hasil riil dari kebudayaan. Dari sini ketahuan kalau beban pariwisata tak terlalu besar sehingga bisa dibentuk dalam bentuk kantor ketimbang dinas,” jelas Kris.

Lebih Fokus
Nantinya setelah ada pemisahan, ujar Kris, Dinas Kebudayaan diharapkan akan lebih fokus mencari dan membina baik budaya fisik maupun nonfisik. Seperti misalnya pengembangan museum, *dolanan* anak, bahkan untuk mengkaji adat istiadat atau tingkah laku.

Selain kebudayaan, Pemerintah Kota Yogyakarta juga berencana membentuk Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Kedaruratan Terpadu yang terpisah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Yogyakarta. Tak hanya menangani kebakaran, kantor tersebut juga akan menangani kejadian darurat lain yang tidak disebabkan oleh bencana alam.

Sementara di Dinas Perizinan akan ditambahkan tugas baru yang berkaitan dengan penanaman modal. Sehingga nantinya akan berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

“Penanaman modal yang ditangani sejak hulu dan hilir, serta adanya fasilitasi, pembinaan dan juga pendampingan terkait segala hal yang berhubungan dengan penanaman modal di Kota Yogyakarta,” ujar Kris.

Selain itu, pihaknya juga akan mengubah Dinas Ketertiban menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai amanat undang-undang.

Badan Lingkungan Hi-

dup juga nantinya akan berubah menjadi Dinas Pertanian, Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Ini artinya, jelas Kris, bidang pertanian akan ditarik dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian.

Selain itu, juga dilakukan pembentukan Badan Komunikasi dan Informasi yang merupakan penggabungan Bagian Humas dan Teknologi Informasi, pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Badan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi.

“Badan tersebut memiliki tugas layaknya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hanya saja kedudukannya berada di daerah,” tutup Kris. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005